



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI SASTRO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 723874

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/72 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , WARISAN Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m²/60 m² di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , WARISAN Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/28 m² di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , LAINNYA Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 154.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH ULTIMO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR 150 STREET FIRE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 83.175.281

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.462.175.281

III. HUTANG

Rp. 63.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.399.175.281



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : **UDI HERDADI**
- Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
- NHK : **157799**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 458.640.000

- Tanah Seluas 459 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
- Tanah Seluas 211 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 135.000.000
- Tanah Seluas 2028 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 263.640.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 92.000.000

- MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 144.997.723**F. HARTA LAINNYA** Rp. 75.000.000**Sub Total** Rp. 772.637.723**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 772.637.723

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SEPTY BAHARINI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 134976

II. DATA HARTA

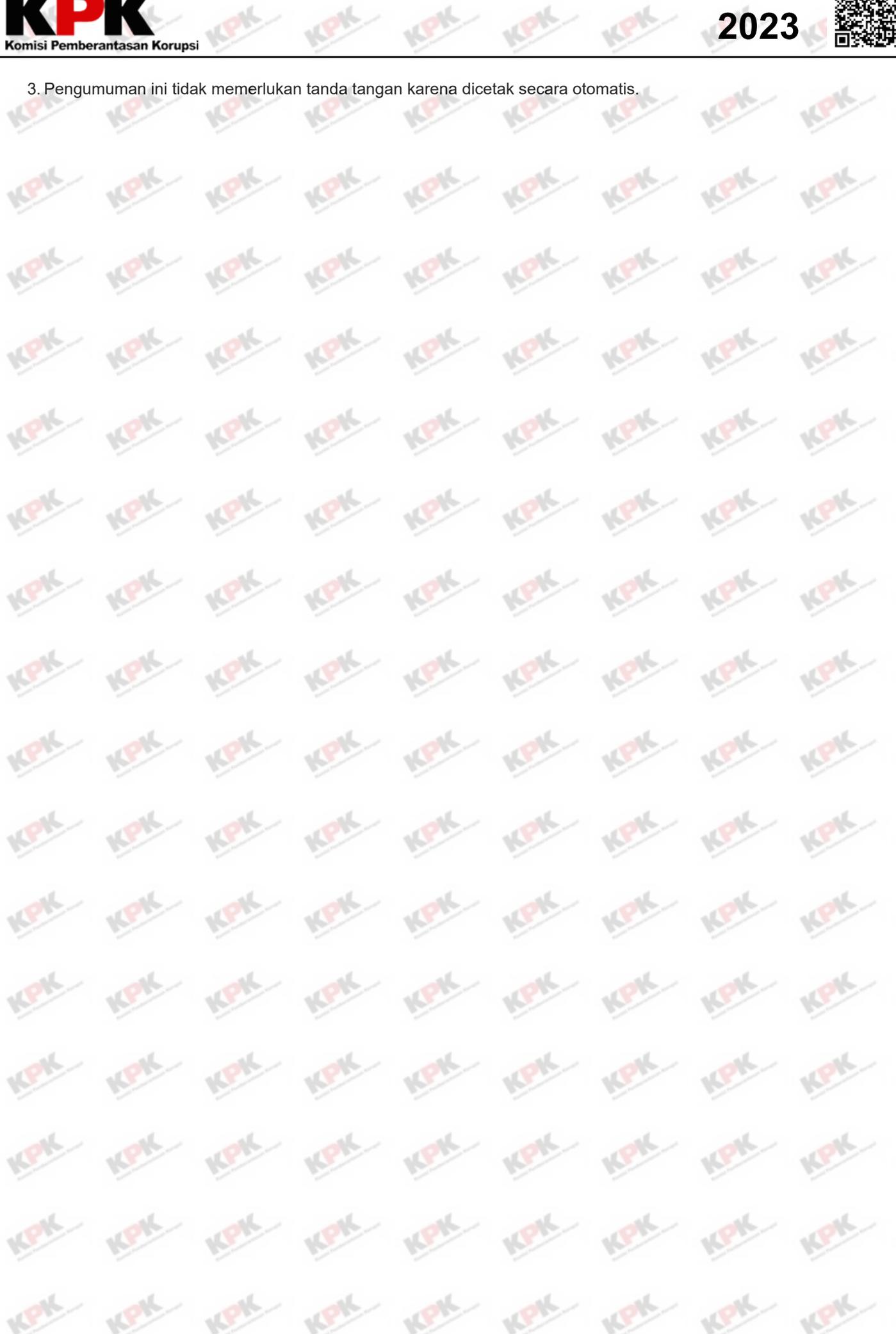
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	170.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	71.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	318.545.010
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	568.795.010
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	568.795.010

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRLY ERWINDAWATY
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 625316

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	142.000.000
1. MOBIL, ZUZUKI MINIBUS Tahun 2020, HIBAH TANPA AKTA	Rp.	142.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	915.105.180
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.099.855.180

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.099.855.180

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : **DEDI SARIFUDIN**
- Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- NHK : **629829**

II. DATA HARTA

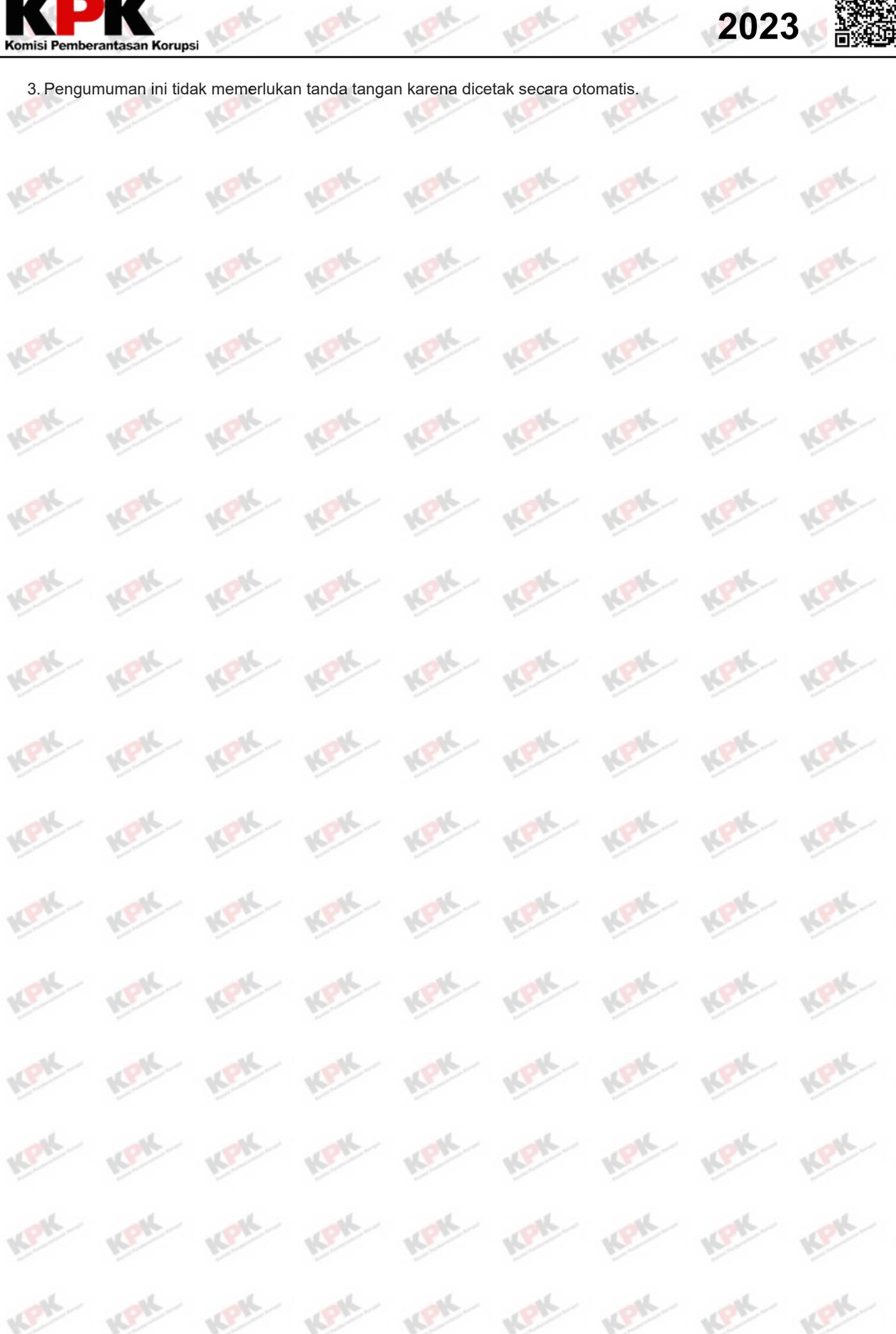
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	112.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2006, HASIL SENDIRI		
Rp. 85.000.000		
2. MOTOR, KAWASAKI ATLIT Tahun 2008, HASIL SENDIRI	Rp.	
6.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA FREE GO Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	
21.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.375.518
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	132.375.518
III. HUTANG	Rp.	55.954.872
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	76.420.646

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD THAMRIN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 629809

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.380.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/129 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/45 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000		
3. Tanah Seluas 12.369 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	210.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INOVA V LUXURY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	173.092.555
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.801.092.555
III. HUTANG	Rp.	399.105.798
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.401.986.757

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : **INDRA GUNAWAN**
- Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- NHK : **487278**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	198.000.000
1. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA SUBANG, WARISAN Rp. 198.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	80.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	66.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.055.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	351.555.500
III. HUTANG	Rp.	62.531.375
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	289.024.125

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.